



BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2024. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah di upayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang



PARLINGGOMAN, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19880410 200701 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	5
5. Sumber Daya Keuangan.....	7
6. Sarana dan Prasarana.....	8
7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENSTRA.....	13
1. Visi.....	13
2. Misi.....	13
3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	14
B. Perjanjian Kinerja tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	19
2. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	23
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.3	Alokasi Anggaran Bapenda Tahun 2024.....	8
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional.....	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Versi Renstra.....	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Versi Pokin.....	18
Tabel 3.3	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 – 2024	20
Tabel 3.6	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
Tabel 3.8	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun	24
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
------------	---------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Susunan Organisasi

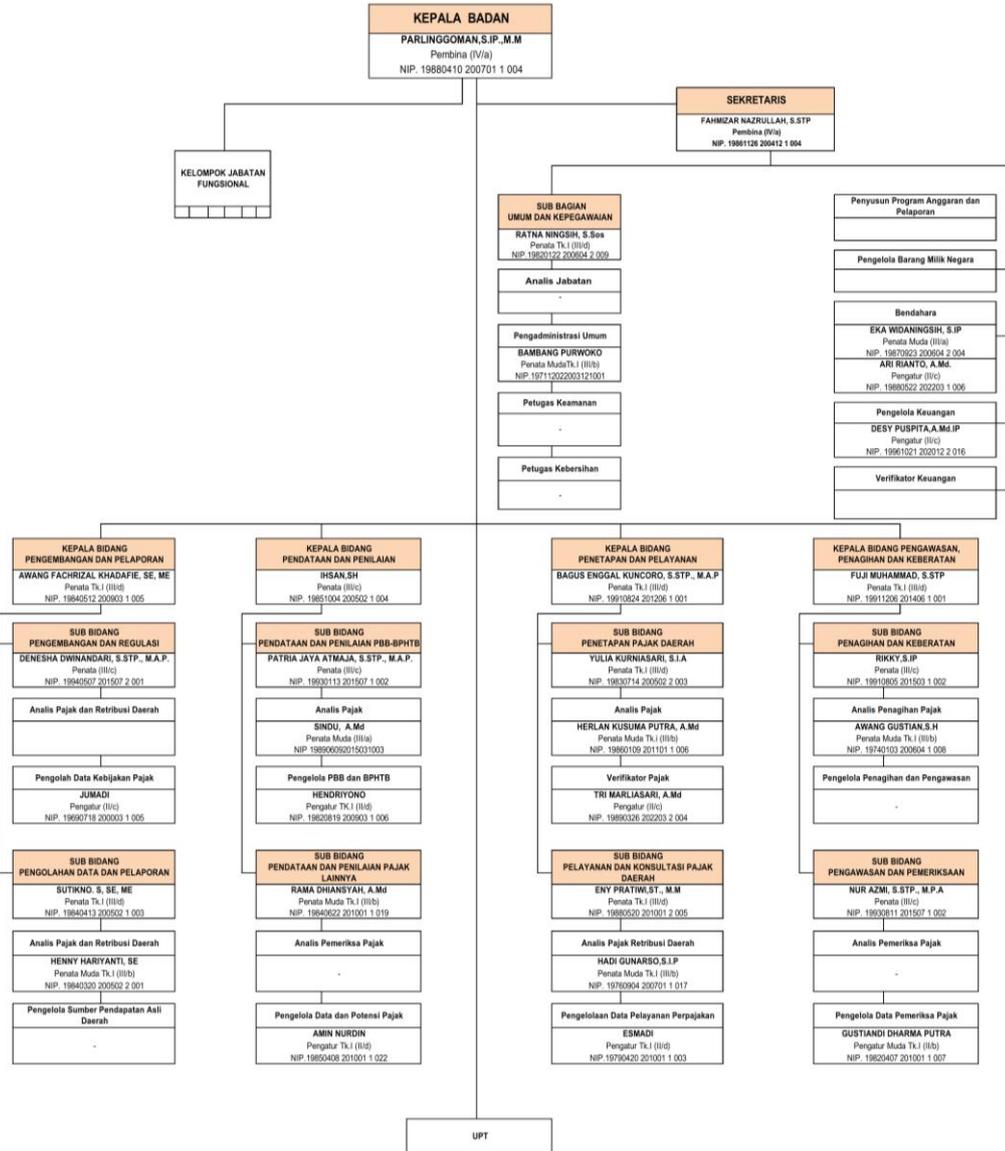
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, yang membawahi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan Membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pelaporan Membawahi :
 - 1) Subbidang Pengembangan dan Regulasi
 - 2) Subbidang Pengolahan Data Dan Pelaporan
- d. Bidang Pendataan dan Penilaian Membawahi :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB
 - 2) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya
- e. Bidang Penetapan dan Penilaian terdiri atas Membawahi :
 - 1) Subbidang Penetapan Pajak Daerah
 - 2) Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan terdiri atas Membawahi :
 - 1) Subbidang Penagihan dan Keberatan
 - 2) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang memiliki struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang



3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 tahun 2023 pasal 7 adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Bapenda memiliki 5 bidang. Tugas masing-masing bidang sebagaimana telah diatur dalam peraturan Wali Kota nomor 7 tahun 2023 yaitu:

- a. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.
- b. Bidang Pengembangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Pelaporan meliputi pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan.

- c. Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penilaian meliputi pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya.
- d. Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Pelayanan meliputi penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
- e. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan, penagihan dan keberatan meliputi penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 30 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2024

No.	Struktur Organisasi	Golongan	Jumlah
1	Kepala Badan	Pembina / IV a	1
2	Sekretariat	Pembina / IV a	1
3	Subbagian Umum, Kepegawaian	Penata Tk.I / III d	1

No.	Struktur Organisasi	Golongan	Jumlah
4	Bidang Pengembangan dan Pelaporan	Penata Tk.I / III d	1
5	Subbid Pengembangan dan Regulasi	Penata / III c	1
6	Subbid Pengolahan Data dan Pelaporan	Penata Tk.I / III d	1
7	Bidang Pendataan dan Penilaian	Penata Tk.I / III d	1
8	Subbid Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB	Penata / III c	1
9	Subbid Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya	Penata / III c	1
10	Bidang Penetapan dan Pelayanan	Penata Tk.I / III d	1
11	Subbid Penetapan Pajak Daerah	Penata Tk.I / III d	1
12	Subbid Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penata Tk.I / III d	1
13	Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan	Penata Tk.I / III d	1
11	Subbid Penagihan dan Keberatan	Penata / III c	1
12	Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan	Penata / III c	1
13	Kelompok Fungsional		18

Tabel 1.2
**Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2024**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	2
2	SLTA	2
3	D1/D2/D3	8

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
4	D4/S1	10
5	S2	8

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar Aparatur Sipil Negara pada Bapenda adalah golongan dengan pendidikan S1/D4 dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang, yang kemudian diikuti golongan pendidikan S2 sebanyak 8 orang, pendidikan D3 sebanyak 6 orang D1 sebanyak 2 orang, pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 2 orang, terakhir pendidikan SMP/SLTP sebanyak 2 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Bapenda telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S1 mencapai 18 orang atau 60% dan komposisi pegawai dilihat dari tingkat pangkat dan Golongan sebagian besar pegawai Bapenda merupakan pegawai Golongan III mencapai 23 orang atau 76,7% dari total pegawai yang dimiliki oleh Bapenda tahun 2024.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan untuk mendukung program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.217.021.767,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.040.163.162,00 dari jumlah anggaran sebelum perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 12.176.858.605,00.

Sumber daya keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Alokasi Anggaran Bapenda Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.324.628.819	10.398.672.409
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.852.229.786	2.818.349.358
Jumlah	12.176.858.605	13.217.021.767

Sumber : DPA Bapenda tahun 2024

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Singkawang dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada Bapenda Kota Singkawang

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Tanah	1	1	0
2	Electric Generating Set Lain-lain	1	1	0
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	4	4	0
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	17	17	0
5	Bosch Ragefinder DLE 70	2	0	2
6	Mesin Penghitung Uang	1	1	0
7	Casio DR 140TM	4	4	0
8	Lemari Besi/Metal	21	21	0
9	Rak Besi	16	16	0
10	Rak Kayu	14	14	0
11	Filing Cabinet Besi	12	12	0

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
12	Brankas Krisbow	1	1	0
13	Lemari Kaca	3	3	0
14	Alat Penghancur Kertas	3	3	0
15	Mesin Absensi	1	1	0
16	Overhead Projector	2	2	0
17	LCD Projector/Infocus	1	1	0
18	Mesin Antrian	2	2	0
19	Teralis	5	5	0
20	Mesin Porforasi	3	3	0
21	Meja Rapat	15	15	0
22	Meja 1/2 Biro	13	13	0
23	Kursi Tamu	3	3	0
24	Kursi Putar Ergonomis	4	4	0
25	Kursi Tamu (sofa)	1	1	0
26	RIONE AD. 029	5	5	0
27	Meubelair Lain-Lain	9	9	0
28	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
29	Hand Dryer	4	4	0
30	Lemari Pendingin	1	1	0
31	Lemari Es	1	1	0
32	AC 5 PK CENTRAL	1	1	0
33	A.C. Sentral	5	5	0
34	A.C. Split	26	26	0
35	Kipas Angin	4	4	0
36	Exhause Fan	4	4	0
37	Air Purifier	3	3	0
38	Alat Pendingin Lain-Lain	12	12	0
38	Blender	1	1	0
40	Televisi	10	10	0
41	Amplifier	1	1	0
42	Equalizer	2	2	0
43	Sound System	2	2	0
44	Mic Conference	2	2	0
45	Unit Power Supply	6	6	0
46	Camera Video	1	1	0
47	Aquarium	1	1	0
48	Tangga Aluminium	2	2	0
49	Dispenser	3	3	0
50	Coffee Maker	1	1	0
51	Tangki Air	1	1	0
52	Mesin Pompa air PMK	1	1	0

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
53	Alat Pemadam/Portable	2	2	0
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	0
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	3	0
58	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	18	18	0
59	Meja Tamu Biasa	2	2	0
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	0
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
63	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	12	0
64	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	22	22	0
65	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis	11	11	0
66	Audio Amplifier	2	2	0
67	Audio Filter	1	1	0
68	Microphone/Wireless MIC	3	3	0
69	Uninterruptible Power Supply (UPS)	40	40	0
70	Proyektor + Attachment	2	2	0
71	Handy Cam	1	1	0
72	CCTV 16 chanel + Paket Lengkap	2	2	0
73	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	12	12	0
74	Digital Video Effect	1	1	0
75	Lensa Kamera	1	1	0
76	Camera Digital	1	1	0
77	Meteran Laser	1	1	0
78	Toa Pengeras Suara	1	1	0
79	Lcd Monitor	1	1	0
80	Camera Digital	1	1	0
81	Pesawat Telephone	1	1	0
82	Telephone Mobile	2	2	0
83	Handy Talky (HT)	5	5	0
84	Peralatan Antena Shf (venus)	1	1	0
85	Generator Set(Lab Scale)	1	1	0
86	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	0
87	Mini Komputer	9	9	0
88	Local Area Network (LAN)	1	1	0
89	Komputer Jaringan Lain-Lain	2	2	0
90	P.C Unit	47	47	0
91	Lap Top	14	14	0
92	Note Book	17	17	0
93	Tablet PC	2	2	0

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
94	Printer	78	78	0
95	Scanner	7	7	0
96	Monitor	1	1	0
97	Computer Compatible	3	3	0
98	HDD External	2	2	0
99	Server	12	12	0
100	Router	1	1	0
101	Modem	3	3	0
102	Rak Server	1	1	0
103	Peralatan Jaringan Lain-Lain	44	44	0
104	Peralatan Komputer Lainnya Lain-Lain	3	3	0
105	Alat Tenis Meja	1	1	0
106	Sepeda Olah Raga	2	2	0
107	Pompa Air	1	1	0
108	Meteran	10	10	0
109	Kalkulator	9	9	0
110	Rak Besi Siku	5	5	0
111	Proyector Spider Bracket	1	1	0
112	Kursi Rapat	2	2	0
113	Kursi Putar	111	111	0
114	Kursi Lipat	5	5	0
115	Meja Komputer	2	2	0
116	Jam Mekanis	1	1	0
117	Exhause Fan	20	20	0
118	DVD Player	4	4	0
119	Stand Mic Black Spider	1	1	0
120	Bracket Black Spider BSSWB810	1	1	0
121	Webcam Logitech C270HD	3	3	0
122	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	23	23	0
123	Peralatan Jaringan Lain-Lain	8	8	0
124	Alat Tenis Meja	7	7	0
		893	891	2

Sumber : KIB Bapenda

7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Singkawang dalam menyelenggarakan meningkatnya pendapatan asli daerah di Kota Singkawang, Bapenda tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di Bapenda Kota Singkawang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan dari daerah kota Singkawang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
- b. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail meningkatnya pendapatan asli daerah, yang harus selalu di up-date karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan;
- c. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan Pendapatan Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan yang akan terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Wali Kota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang jabatan.

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah kota Singkawang **“Mewujudkan Sistem Perpajakan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:

- a. **Pelayanan Berkualitas;** Memberikan pelayanan prima yang ramah, cepat dan akurat kepada seluruh wajib pajak daerah.
- b. **Transparansi dan Keadilan;** Menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengumpulan dan penegakan pajak daerah.
- c. **Peningkatan Kepatuhan;** Mengedukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan daerah dan mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi melalui pendekatan edukatif dan fasilitatif.
- d. **Invoasi dan Efisiensi;** Mengimplementasi teknologi dan sistem informasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelayanan perpajakan daerah.

- e. **Partisipasi dan Kemitraan;** Membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat, instansi terkait, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkaran yang mendukung pelayanan publik yang optimal.

3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi ada pencapaian misi dengan mempertimbangkan daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai yang akan datang, dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjangserta mewujudkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang berdasarkan RPD-P Kota Singkawang tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi”** Dengan indikator tujuan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.

b. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan

demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang adalah “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**”.

c. Indikator Kinerja Utama

Adapun untuk dapat mengetahui pencapaian Sasaran diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah kota Singkawang adalah:

- 1) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, 21,6%
- 2) Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah, 100%

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja setelah APBD ditetapkan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sehingga pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2024 yang juga merupakan Kontrak Kinerja dengan Wali Kota Singkawang, dimana Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut dapat diuraikan per sasaran dan program sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,6 %
		2. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%
		3. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.852.229.786
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.324.628.819
Jumlah Anggaran		Rp. 12.176.858.605

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Versi PokinTahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,6 %
		2. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.818.349.358
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.398.672.409
Jumlah Anggaran		Rp. 13.217.021.767

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penelitian, evaluasi dan analisis kerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan target. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil capaian indikator kinerja utama sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Versi Rencana Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,6%	29,1%	29,10
		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	108,2 %	108,24
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB		

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Versi Pohon Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,6%	29,1%	134,72
		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	108,2 %	108,24
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,3	103,88

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;

Tabel 3.3
Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,6%	29,1%	134,72
		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	108,2 %	108,24
Rata - Rata					121,48

Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 telah memenuhi target. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi di kota singkawang saat ini terjadi peningkatan ekonomi.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa output dan outcome.

Pengukuran kinerja yang dilakukan tersebut diatas didukung dengan:

- 1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.398.672.409	10.182.279.104	97,92	121,48	25,95
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.818.349.358	2.625.195.200	93,15		
		13.217.021.767	12.807.474.304	96,90	121,48	24,58

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program sebesar 96,90% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 121,48%, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 24,58

- 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian Kinerja sampai dengan 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi Kinerja 2022-2024 dengan target akhir 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Target 2024
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	24,15 %	25,17 %	29.10 %	21.6%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Target 2024
			2022	2023	2024	
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	113,12 %	99,79 %	108,24 %	100%

Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami kelebihan dari target pada tahun 2024, dimana tingkat Kenaikannya sebesar 7.74%. dan Capaian PAD telah mengalami kelebihan dari target pada tahun 2024, dimana tingkat Kenaikannya sebesar 8,24%.

- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
- a) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah khususnya Pajak Air Tanah (Meteran Air) karena tidak tercantum dalam SHS;
 - b) Belum adanya integrasi antara aplikasi SIGAP Bapenda dengan aplikasi dari BPN untuk menyatukan Data NIB dan NOP wajib pajak PBB;
 - c) Belum adanya integrasi antara aplikasi SIGAP Bapenda dengan aplikasi Samsat Online;
 - d) Belum adanya regulasi terkait penilaian, penetapan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah;
 - e) Masih banyak wajib pajak PBB yang tidak menerima SPPT PBB secara fisik dari kelurahan;
 - f) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Aplikasi SIGAP Bapenda;
 - g) Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh;
 - h) Kurangnya kapasitas SDM yang ada di Bapenda untuk pelaksanaan Penilaian, Pendataan dan Penertiban Pajak Daerah;
 - i) Kurangnya jumlah porsonil di Bapenda Kota Singkawang.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Membuat usulan SHS terkait rekening belanja pengadaan meteran air untuk diperbaiki;
 - b) Melakukan Kerjasama dan integrasi aplikasi SIGAP dan aplikasi yang digunakan BPN;
 - c) Melakukan Kerjasama dan integrasi aplikasi SIGAP dan aplikasi Samsat Online;
 - d) Mengusulkan draft Perwako tentang tata cara penilaian, penetapan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah;
 - e) Bapenda menerbitkan E-SPPT PBB melalui Aplikasi SIGAP, sehingga wajib pajak dapat mendownload secara langsung tanpa harus datang kekelurahan;
 - f) Bapenda akan melakukan sosialisasi kembali mengenai Aplikasi SIGAP lewat media online, Baliho, dan Pekan Pajak Daerah;
 - g) Pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal (Kejaksaan, Polres, KPP Pratama) untuk kegiatan pengawasan;
 - h) Membangun kapasitas SDM dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan dengan melakukan kerjasama dengan PKN STAN, KPP Pratama, maupun Instansi lainnya yang memiliki kompetensi;
 - i) Melakukan pengusulan pengisian formasi yang masih tersedia di struktur organisasi Bapenda ke BKPSDM Kota Singkawang untuk di isi.
- 4) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
- a) Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - b) Pelaksanaan pengembangan digitalisasi dan inovasi layanan pajak daerah;
 - c) Pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak ;
 - d) Pelaksanaan kolaborasi dengan pihak ketiga;

e) Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi berkala.

2. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;

Tabel 3.6
Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,28	103,86
Rata - Rata					103,86

Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik tahun 2024 telah memenuhi target. Hal ini dikarenakan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah sudah Baik.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran Quisoner Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok stakeholder.

Pengukuran kinerja yang dilakukan tersebut diatas didukung dengan:

1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.398.672.409	10.182.279.104	97.92	103,86	5,94
		10.398.672.409	10.182.279.104	97.92	103,86	5,94

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program sebesar 97,92% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,86%, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi dengan tingkat efisiensi sebesar 5,94.

2) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Tabel 3.8
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur	IKM Tahun 2024	Mutu Layanan
1	Persyaratan	88,3	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86,6	Baik
3	Waktu Penyelesaian	82,8	Baik
4	Biaya/Tarif	96,7	Sangat Baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	86,3	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,55	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	87,85	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	84,95	Baik
9	Sarana dan Prasarana	91,2	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai terendah.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%, yang

dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
 - a) Belum maksimalnya waktu penyelesaian pelayanan dikarenakan kurangnya personil pelayanan;
 - b) Kurangnya sarana prasarana dalam pelayanan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Penambahan jumlah personil pelayanan bapenda
 - b) Menyediakan Anggaran untuk Menunjang terpenuhinya sarana prasarana penunjang pelayanan publik.
- 5) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
 - a) Pelaksanaan pengembangan digitalisasi dan inovasi layanan pajak daerah
 - b) Pelaksanaan kolaborasi dengan pihak ketiga
 - c) Pengadaan sarana dan prasanana untuk pelayanan publik

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang per program/kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Realisasi Belanja Bapenda Kota Singkawang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.398.672.409	Rp. 10.182.279.104	97,92%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.958.157	Rp. 17.613.200	98,08%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.334.234.409	Rp. 7.215.256.809	98,38%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 4.810.249	Rp. 4.727.300	98,28%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 87.511.900	Rp. 87.480.000	99,96%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 893.084.858	Rp. 883.997.981	98,98%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.029.150.312	Rp. 1.016.249.800	98,75%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 782.350.575	Rp. 709.309.653	90,66%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 249.571.949	Rp. 247.644.761	99,23%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.818.349.358	Rp. 2.625.195.200	93,15%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.818.349.358	Rp. 2.625.195.200	93,15%
JUMLAH		Rp 13.217.021.767	Rp. 12.807.474.304	95,53%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LAKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, terdapat Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Dengan penilaian secara mandiri Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari 2 program secara total memperoleh kategori capaian “Berhasil”.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2024, diantaranya :

- A. Memonitor secara berkala pelaksanaan kegiatan tahun 2024;
- B. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari Bappeda, Inspektorat Daerah dan Instansi Vertikal dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- C. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;

- D. Mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
- E. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan daerah serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang



PARLINGGOMAN, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19880410 200701 1 004